
MODEL PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI NELAYAN BERKELANJUTAN

Iin Indarti

STIE Widya Manggala Semarang
email : iinindarti91@gmail.com

Kata kunci:

Kesejahteraan,
Koperasi,
Lingkaran
Kemiskinan

Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan yang berkelanjutan. Selain itu penelitian ini menemukan model dalam rangka mengurai lingkaran kemiskinan di wilayah pesisir kota Semarang. Responden dalam penelitian ini adalah nelayan di wilayah pesisir kota Semarang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) langsung kepada nelayan, juragan dan bakul ikan. Hasil penyebaran questioner kemudian dianalisa secara deskriptif serta SWOT Matrix. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen koperasi dikelola apa adanya, cenderung statis, tidak maksimal dilingkungan sumber daya yang melimpah. Koperasi tidak mampu sebagai motor penggerak perekonomian, motivasi anggota koperasi untuk berkembang sangat rendah, cenderung masa bodoh. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam mengurai lingkaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Semarang.

Keywords:

welfare, economic
cooperation,
coasted area

Abstract

This research generally aimed to increase the welfare of fisherman community through the strengthening of fisherman cooperation institution sustainably. Moreover, this research attempts to find the model to disentangle the poverty circle in the coastal area of Semarang. Respondents of this research are fishermen in the coastal area of Semarang. The collection of primary data is conducted through Participatory Rural Appraisal (PRA) method directly to the fishermen, fish traders and fishermen's bosses. The result of the questionnaires distribution is then analyzed descriptively and by SWOT matrix. The result of this research reveals that cooperation management is managed unprofessionally, tend to be static and not maximal although located in the rich resources area. This situation causes the cooperation cannot act as the locomotive of the economy, the motivation of cooperation members to move ahead is very low and tend to be apathetic. The strengthening of the fishermen cooperation institution sustainably is the strategic action in disentangling the poverty circle to increase the welfare of coastal Semarang community.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara maritim yang mempunyai luas laut sekitar 70% dari total luas wilayah Indonesia. Potensi sumberdaya alam yang melimpah semakin menambah keyakinan bahwa negara ini adalah negara maritim. Di balik nama besar itu, masih banyak penduduk yang tidak atau bahkan belum merasakan udara pembangunan yang telah lama digalakkan di negara ini. Masyarakat pesisirnya kebanyakan masih hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, salah satunya melalui hukum atau kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Selama tiga dasawarsa terakhir pembangunan kelautan dan perikanan selalu diposisikan sebagai sektor yang dipinggirkan (*peripheral sector*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini berarti bahwa bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim dan jasa-jasa kelautan, bukan merupakan tujuan utama (*main stream*) kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini sangat ironis, mengingat bahwa hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomis yang sangat tinggi. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8

juta km² yang terdiri atas 0,3 juta km² laut territorial, 2,8 juta km perairan nusantara dan 2,7 juta km perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sehingga secara ekonomis sangat logis bila pada masa yang akan datang pembangunan nasional diarahkan pada bidang kelautan dan perikanan.

Kata pembangunan bagi sebagian masyarakat pesisir adalah kata asing yang tidak terdeteksi oleh pemikiran masyarakat yang sehari-hari hanya bergulat dengan alam untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pola kerja dan peralatan yang minimal. Masyarakat pesisir identik dengan individu yang hidup di areal sekitar pantai yang terkadang terlupakan oleh pembangunan sebab kebijakan pemerintah yang hanya terfokus pada pembangunan wilayah pesisir. Kehidupan nelayan yang masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, yang semakin sulit dan sebagai sarana para nelayan memperbaiki kualitas hidupnya.

Selain itu, sebagian besar anggota keluarga masyarakat pesisir termasuk anggota keluarga yang tidak produktif, terutama dari segi ekonomi, karena hanya menggantungkan pola hidupnya dari pendapatan suami dari melaut, semata-mata istri hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Di sisi lain hasil tangkapan yang merupakan sumber utama dijual bukan kepada konsumen langsung tapi kepada

tengkulak atau kepada nelayan lain yang kondisi ekonominya lebih baik (bakul ikan atau pedagang ikan), yang mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai pedagang ikan dan rentenir. Nelayan harus menjual ikannya dengan harga yang sangat murah sebagai kompensasi pinjaman yang telah diberikan. Kondisi ini yang menjerat leher nelayan, yang mau tidak mau harus dijalani demi kehidupan dan di sisi lain mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi

Pola-pola pekerjaan sebagai nelayan membatasi aktivitas ke sektor pekerjaan lain, mengingat nelayan sangat terikat dengan pekerjaan menangkap ikan di laut sehingga nelayan membatasi aktivitas ke sektor pekerjaan lain. Hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya kemiskinan di kehidupan nelayan. Penelitian ini memberikan model peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai salah satu pengembangan dari program pengembangan masyarakat pesisir yang kurang maksimal berjalan dan kurang menyentuh masyarakat wilayah paling ujung.

Tinjauan Pustaka

Kelembagaan merupakan satu konsep yang belum memperoleh pengertian yang jelas, dalam pengertian bahasa keilmuan, organisasi formal dan organisasi non formal, lembaga formal dan lembaga non formal, institusi, asosiasi, maupun kelembagaan disebut dengan kelembagaan,

yang didalamnya mengandung 2 pengertian yaitu pengertian secara kelembagaan dan pengertian secara keorganisasian. Pengertian secara kelembagaan terdiri dari hal yang lebih abstrak yang menentukan jiwa dari organisasi itu sendiri, yang menyangkut nilai, norma, etika dan berbaagai hal yang terkait atau berbagai aturan yang tertulis, yang berkaitan dengan system kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain (Syahyuti, 2005).

Sedangkan jika berhubungan dengan aspek keorganisasian menunjukkan sesuatu yang lebih statis, yaitu struktur, penetapan peran, tujuan, keanggotaan dan lain-lain, yang difokuskan pada struktur, peran, aktivitas, hubungan antar peran, integritas sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur riil, struktur kewenangan kekuasaan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, profil, pola kekuasaan dan lain-lain.

Pada tahun 2001, program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilakukan pemerintah mengalami berbagai penyempurnaan oleh pemerintah melalui pemberian masukan dan evaluasi dari berbagai pihak, masyarakat, LSM maupun instansi-instansi yang terlibat langsung dan tidak langsung. Akhirnya pada tahun 2004 Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro

Mitra Mina yang pada awalnya organisasi kecil milik nelayan wilayah pesisir ditingkatkan statusnya menjadi koperasi. Perubahan status ini diimbangi pula perubahan sistem penyaluran dan status DEP (Dana Ekonomi Produktif) yang semula berstatus sebagai dana bergulir yang dikelola oleh LEPP-M3 menjadi dana hibah yang diberikan kepada koperasi yang dijaminan kepada perbankan., artinya yang sebelum tahun 2004 sebelum dinaikkan menjadi bentuk koperasi DEP yang langsung disalurkan kepada Program Pemberdayaan ke nelayan, tapi setelah menjadi koperasi dana diberikan melalui perbankan dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan mulai memperkenalkan adanya bunga dan agunan.

Mitra yang diajak kerjasama oleh pemerintah dari unsur perbankan adalah BRI atau BPD Jawa Tengah dalam pemberian kredit. Kredit sendiri merupakan penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi pada saat sekarang, atas dasar kepercayaan, sebagai pengganti sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi yang sepadan di kemudian hari (UU No. 20/2008), yang memenuhi unsur Kepercayaan (*trust*), pertukaran nilai ekonomi, kelak di kemudian hari (*futurity*) dan risiko (*risk*)

Perubahan sistem ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan menekankan konsep pemberdayaan, oleh karena itu program jangka panjang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
3. Pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pengembangan unit usaha Koperasi LEPP-M3 diarahkan pada unit usaha keuangan dan sektor riil, beberapa unit yang dikembangkan oleh program PEMP adalah :

1. LKM Swamitra Mina merupakan salah satu unit usaha LEPP-M3 yang bergerak di bidang pelayanan permodalan bagi masyarakat pesisir, terutama untuk segmen usaha mikro. Unit usaha ini bermitra dengan BRI dengan bertujuan pemenuhan permodalan.

2. Unit simpan Pinjam merupakan unit usaha LEPP-M3 yang bergerak dalam pelayanan permodalan terutama untuk segmen usaha mikro melalui mekanisme simpan pinjam.
3. Bank Perkreditan Rakyat Pesisir, unit usaha ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk mendekatkan lembaga perbankan kepada masyarakat pesisir.

Koperasi adalah kepribadian yang merupakan ciri, sifat dan watak koperasi yang membedakannya dengan lembaga ekonomi lain, dengan kata lain koperasi dalam pemikiran, sikap dan tindakannya tidak sesuai dengan perumusan jati diri tersebut maka dapat dikatakan bahwa koperasi yang bersangkutan telah menyimpang atau kehilangan jati dirinya, sehingga jati diri koperasi meliputi tiga bagian, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan-pisahkan, yaitu definisi, nilai—nilai dan prinsip-prinsip (Soedjono, 2002)

Koperasi sendiri merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Koperasi merupakan salah satu organisasi yang dilibatkan dalam

pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Struktur Umum Organisasi pengelola PEMP kota Semarang dalam pelaksanaannya dikelola oleh :

- a. Pemerintah Pusat, yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan pulau-pulau kecil, bertugas menyusun pedoman umum, sosialisasi nasional dan regional, pelatihan skala nasional dan monitoring serta evaluasi.
- b. Pemerintah Daerah yaitu Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab program di daerah, sedangkan penanggungjawab langsung di daerah adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota bertugas menetapkan Konsultan manajemen Kabupaten/Kota, sosialisasi dan publikasi tingkat kabupaten/kota, menetapkan koperasi pelaksana, *recruitment* tenaga pendamping desa, pelatihan, monitoring dan evaluasi.
- c. Tenaga pendamping Desa (TPD), bertugas mendampingi masyarakat secara terus menerus selama kegiatan program dalam bentuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut, penyiapan rencana usaha dan pengelolaannya.
- d. Koperasi, merupakan representasi *holding company* milik masyarakat pesisir dengan berbagai unit usaha,

yang diharapkan mampu berperan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan unit usaha lain.

- e. Bank pelaksana, bertugas menyalurkan kredit kepada LEPP-M3 dan melakukan pendampingan teknis dan administratif kepada koperasi

Metode Penelitian

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2014, dengan pengambilan data dilakukan selama 5 bulan dengan lokasi pengambilan data di wilayah pesisir Kota Semarang yang meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk, dan tersebar dalam 11 Kelurahan, yaitu kelurahan Mangunhardjo, Kelurahan Mangkang wetan, Kelurahan Randugarut, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tugurejo, Kelurahan Tambakhardjo, Kelurahan TanjungMas, Kelurahan bandarhardjo, Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Terboyo Wetan dan Kelurahan Trimulyo.

Adapun tempat penelitian adalah kelurahan Tanjung Mas dan Kelurahan Bandarhardjo Kecamatan Semarang Utara. Dua kelurahan tersebut mewakili seluruh kecamatan pesisir Kota Semarang karena terdapat kesamaan sosial-ekonomi, kultur, budaya dan demografi.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden yaitu *stakeholder* yaitu juragan kapal, Bakul ikan dan nelayan itu sendiri.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menilai implikasi dari Koperasi nelayan terhadap peningkatan pendapatan nelayan serta menggunakan juga analisis kondisi internal dan eksternal kelembagaan.

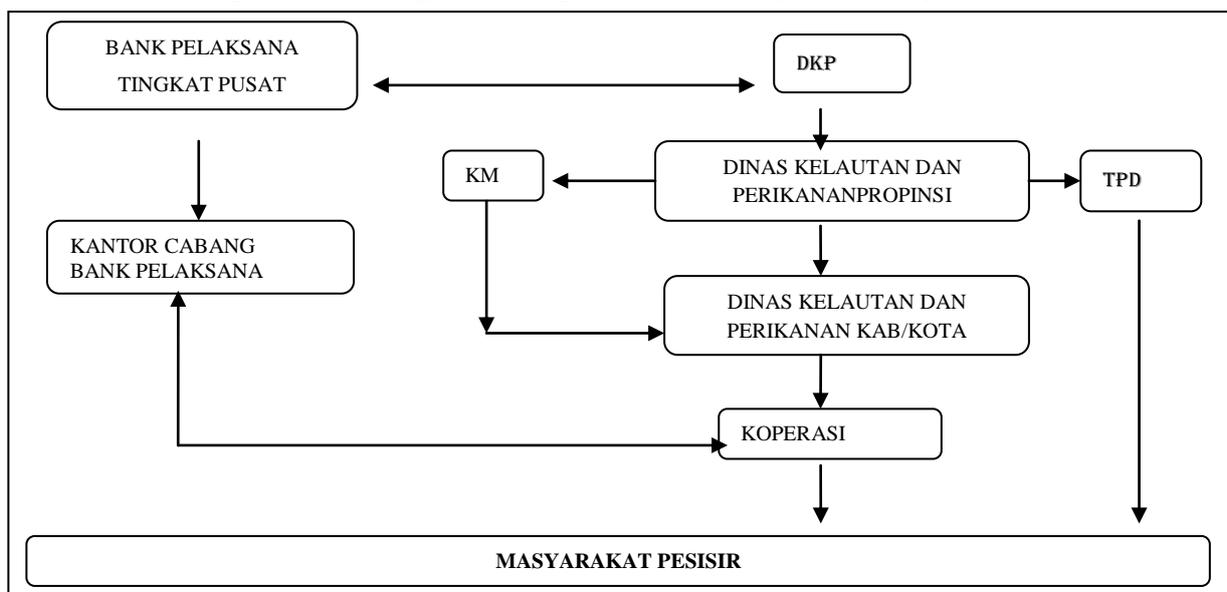
Analisis kondisi internal dan eksternal kelembagaan Koperasi di wilayah pesisir Kota Semarang yang meliputi empat Kecamatan dan tersebar dalam 11 kelurahan menggunakan metode *Internal Factors Analysis Summary (IFAS)* dan *eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)*. Analisis IFAS untuk mengidentifikasi strategi-strategi alternatif kelembagaan yang bisa dikembangkan sehingga program pemberdayaan masyarakat pesisir dapat berjalan dengan maksimal. Penilaian dengan metode ini didasarkan pada nilai penting suatu atribut dan pengaruh atribut tersebut terhadap atribut yang lainnya dalam satu faktor (Marimin, 2008).

Pengelompokkan atribut ke dalam 4 faktor, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Pengelompokkan atribut yang termasuk dalam faktor kekuatan dan kelemahan berdasarkan pada kondisi lapangan, yaitu atribut yang kondisinya sangat buruk atau kurang baik masuk dalam faktor kelemahan sedangkan yang optimal sampai sangat baik masuk dalam faktor kekuatan.

- c. Diversifikasi sistem kelembagaan dan usaha sesuai dengan potensi dan permasalahan koperasi
- d. Peningkatan usaha pengelolaan koperasi baik dari sisi anggota, usaha maupun keuangannya.
- e. Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal lembaga

Berikut adalah gambar fungsi dan hubungan lembaga PEMP dan koperasi wilayah pesisir.

Gambar 1
Fungsi dan Hubungan Lembaga PEMP dan Koperasi Wilayah Pesisir



Sumber : Koperasi LEPP-M3

Hasil dan Pembahasan

Analisis SWOT

Berdasarkan analisis SWOT, strategi penguatan kelembagaan Koperasi di wilayah pesisir Semarang, meliputi :

- a. Optimalisasi peranan dan kinerja kelembagaan koperasi
- b. Perluasan jaringan kelembagaan dan usaha

Berdasarkan fungsi dan kelembagaan koperasi dan PEMP serta hasil evaluasi internal dan eksternal keberadaan dan peranan koperasi nelayan di wilayah pesisir Semarang memiliki potensi sebagai kekuatan dan peluang serta memiliki kendala sebagai kelemahan dan ancaman. Berdasarkan perkembangan dan

keadaan koperasi nelayan mulai berdiri sampai sekarang, maka :

1. Kekuatannya meliputi tenaga kerja cukup tersedia, usia potensial, motivasi untuk mendirikan koperasi serta dorongan pemenuhan kebutuhan modal untuk menjalankan hidup.
2. Peluang, meliputi potensi sumber daya ikan yang masih tersedia, kesempatan kerja di bidang perikanan, keberadaan perkumpulan keagamaan, serta dukungan pemerintah.
3. Kelemahannya, meliputi rendahnya taraf pendidikan, rendahnya sumber daya manusia, keterbatasan akses permodalan, keterbatasan akses pemasaran, keterbatasan akses hubungan dengan pihak luar, ketergantungan dengan rentenir, keterbatasan jiwa wirausaha, belum maksimalnya peranan kelompok masyarakat pesisir serta keterbatasan fasilitas penunjang.
4. Ancamannya, meliputi tidak ada daya tawar hasil ikan, harga ikan rendah, harga BBM tinggi, pekerjaan yang menanggung resiko, cuaca dan musim buruk, *illegal fishing*, manajemen keuangan keluarga, tdk ada diversifikasi pekerjaan

Berdasarkan penilaian internal dan eksternal diatas maka dirumuskan strategi perbaikan kelembagaan koperasi dengan

mengembangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki, meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi, yang dirumuskan dalam matriks SWOT. Hasil analisis SWOT dirumuskan alternatif perbaikan strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan pengetahuan tentang perkoperasian
2. Pengembangan jiwa motivasi untuk mendirikan koperasi
3. Pengembangan ketrampilan nelayan terutama tentang perkoperasian.
4. Pengembangan perkoperasian yang berjiwa koperasi dan padat karya
5. Pengembangan akses permodalan
6. Pengembangan akses pemasaran
7. Penguatan Kelembagaan informal dalam masyarakat
8. Pembangunan sarana penunjang usaha perikanan
9. Pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat.

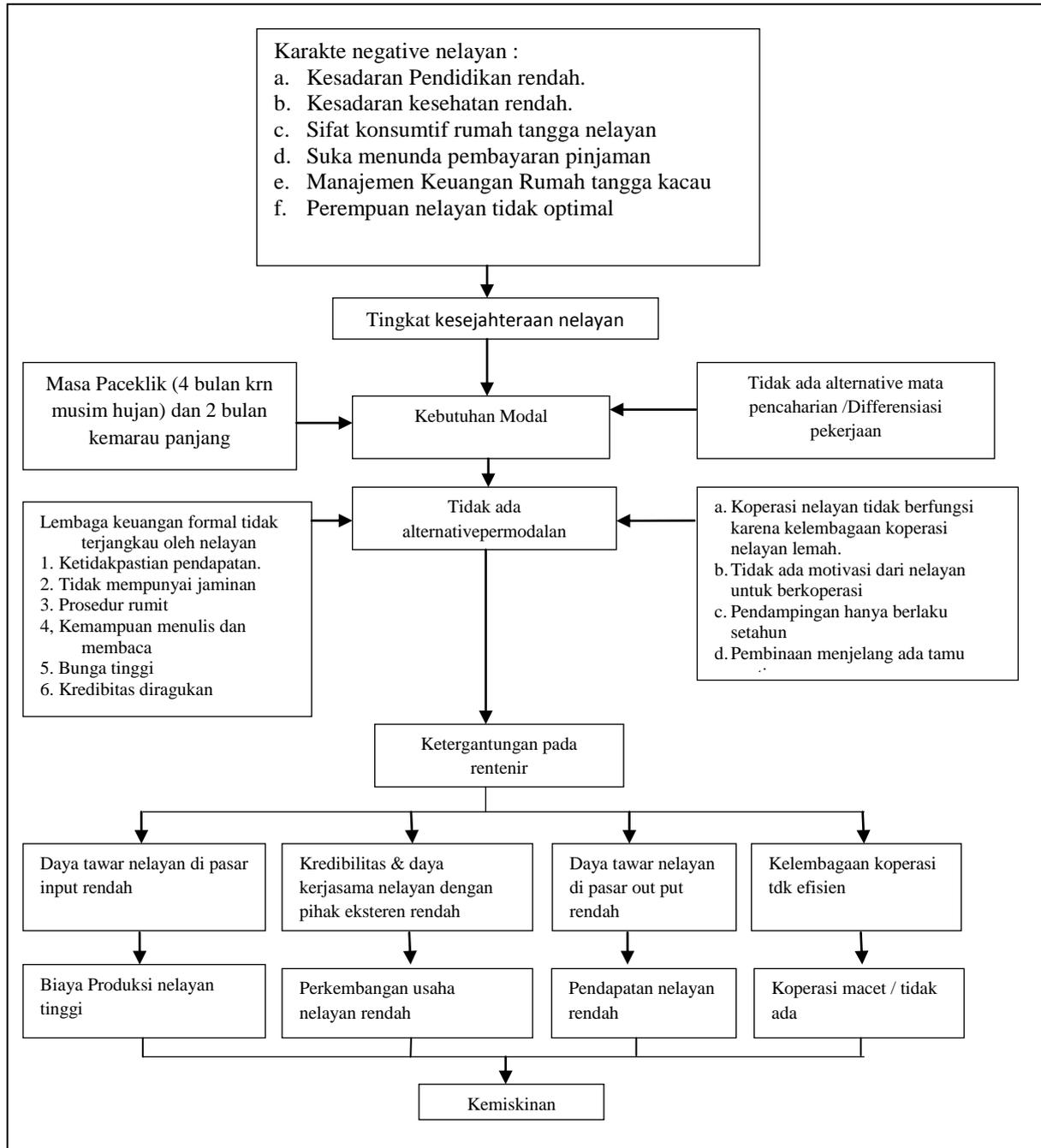
Dengan demikian, keseriusan dan ketulusan untuk berpihak kepada kepentingan nelayan merupakan syarat mutlak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sehingga akan menimbulkan kebanggaan sebagai nelayan, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab lemahnya kelembagaan koperasi nelayan, antara lain:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya komitmen dari pihak terkait untuk penguatan kelembagaan koperasi nelayan, khususnya tentang minimnya pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus dan anggota koperasi nelayan. 2. Belum adanya komitmen dari pihak terkait untuk memberikan kesempatan sepenuhnya kepada koperasi nelayan untuk mengelola program pemerintah secara mandiri. Program pemerintah yang ada justru semakin melemahkan | <ol style="list-style-type: none"> kelembagaan koperasi nelayan dengan indikasi semakin meningkatnya ketergantungan koperasi nelayan terhadap bantuan dana pemerintah. 3. Pengurus dan anggota koperasi nelayan belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang perkoperasian yang benar 4. Rendahnya kesadaran nelayan terhadap pentingnya pendidikan sehingga menimbulkan perilaku yang negatif dan kredibilitas yang rendah |
|---|--|

Tabel 1
Matrik SWOT Strategi Perbaikan Kelembagaan Koperasi

	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan(Weakness)
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kerja cukup tersedia 2. Usia Potensial 3. Motivasi mendirikan koperasi 4. Dorongan alternatif sumber pendanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan nelayan ttg koperasi masih sgt rendah 2. Lemahnya sumber modal 3. Akses pemasaran terbatas 4. Keterbatasan fasilitas penunjang
Faktor Eksternal		
Peluang(Opportunities)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi SDI masih bisa dimanfaatkan maksimal 2. Peluang kesempatan kerja sampingan 3. Mendirikan koperasi 4. Dukungan Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan nelayan 2. Pengembangan perkoperasian di wilayah pesisir untuk akses modal kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan teknologi 2. Pengembangan akses permodalan. 3. Pengembangan akses pemasaran 4. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan 5. Pembangunan sarana dan prasarana
Ancaman (Threats)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga ikan rendah 2. Daya tawar nelayan rendah 3. Harga BBM tinggi 4. Kerusakan sumber daya alam 	<p>Pengolahan koperasi berbasis masyarakat, pengembangan pengetahuan dan ketrampilan manajerial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan akses pemasaran 2. Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan nelayan 3. Pengembangan sumber daya perikanan berbasis nelayan

Gambar 2
Lingkaran Kemiskinan Nelayan Pesisir Kota Semarang



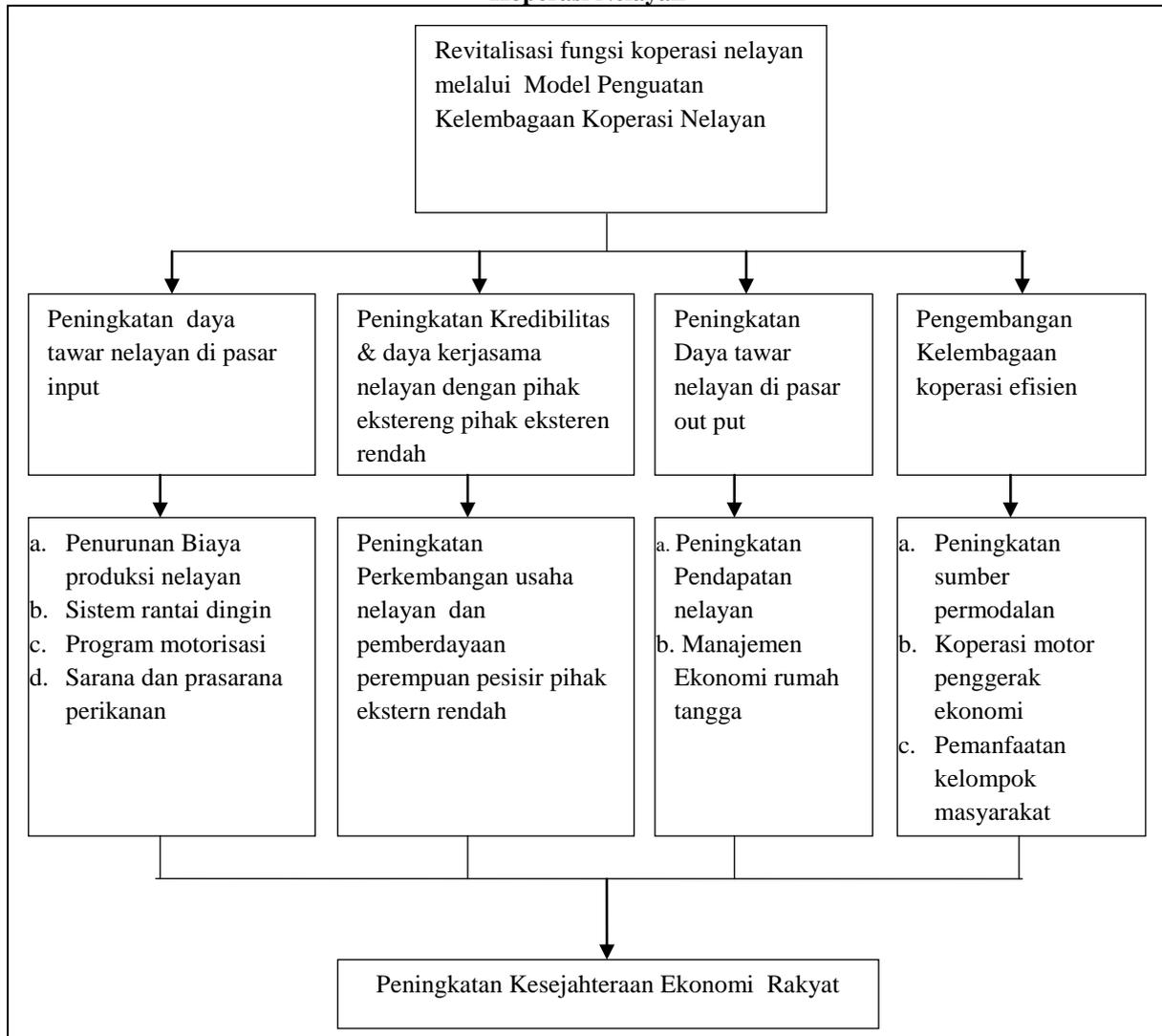
Sumber: Analisis Situasi Wilayah Kampung Nelayan di pesisir Semarang

Model Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan

Pemberdayaan ekonomi nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan merupakan solusi yang sangat

lemahnya kekuatan pasar yang dimiliki. Tetapi secara kolektif melalui manajemen koperasi yang profesional, kekuatan pasar nelayan di pasar input dan output akan meningkat. Dengan demikian kesejahteraan nelayan juga meningkat.

Gambar 3
Alur Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan



Sumber: Analisa data, 2014

Model penguatan kelembagaan koperasi tidak bisa berjalan maksimal apabila lembaga yang memelopori juga tidak melakukan perubahan, dibawah ini ada strategi yang harus dilakukan sehingga pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan dapat maksimal dalam pencapaian kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir kota Semarang.

Berdasarkan hasil analisa implikasi program PEMP terhadap aspek sumberdaya

bergeser dari tujuan awal untuk menyejahterakan nelayan. Berdasarkan hal inilah maka perlu adanya program atau model untuk penguatan kapasitas kelembagaan agar bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apabila sekelompok nelayan bergabung membentuk kerjasama koperasi, maka mereka dapat meraih manfaat dari pencapaian skala ekonomi dan penguatan daya tawar di pasar input dan output. Manfaat-manfaat dari skala ekonomi tersebut diperoleh melalui *economies of materials, economies of machinery, economies of highly organized buying and selling* dan *economies of skill*.
2. Manfaat koperasi merupakan output dari pelaksanaan fungsi-fungsi kegiatan koperasi di dalam melayani anggota. Koperasi melaksanakan kegiatan produksi yang menekankan kepada aspek kewirausahaan dan pengorganisasian (*entrepreneurial-organisational aspects*).
3. Skala kegiatan ekonomis tercapai melalui koperasi karena koperasi merupakan kerjasama kegiatan ekonomi yang sama dari seluruh anggota yang tergabung di dalamnya. Dengan demikian, pembentukan suatu koperasi merupakan keputusan untuk membangun suatu aliansi strategis atau *intercompany cooperation* di antara nelayan guna mencapai keunggulan kompetitif.

Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Setiap program pemerintah hendaknya bersifat terpadu antar instansi terkait, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara para pelaksana program serta mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat secara optimal.
2. Pengurus dan anggota koperasi sebaiknya diberi bekal pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian yang memadai

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, *Semarang dalam Angka 2009/2010*, Semarang
- _____, *Semarang dalam Angka 2011/2012*, Semarang
- Bapermas, Jateng, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai*
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2003, *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir PEMP*, Departemen Kelautan dan Perikanan
- Dwi, 2009, *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008*, Kompas, 18 Februari 2009
- Fajar, Mukti ND, 2011, *Kebijakan pemberdayaan Masyarakat Pesisir Hendaknya Pertimbangkan Nilai Masyarakat*, UMY
- Fedriansyah, Andi Muhammad, 2008, *Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi*

- Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tugu*, Semarang, UNDIP
- Joanita, JD, 2012, “*Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEPM) di Kabupaten Muna*”, S2PPUNS
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2004, tentang *Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP)*, 2009
- Nikijuluw, Victor P.H., 2001, *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*, Makalah Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB
- Nurani, TW, 2003, *Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process), Suatu Metoda untuk Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Konsep Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan di Indonesia*, Bogor, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan, IPB
- Ranupandojo, Heiddjirachman, 1992, *Aspek Kelembagaan Koperasi*, Makalah Seminar, FE-UGM, Yogyakarta
- Soedjono, Ibnoe, 2003, *Hubungan Gerakan Koperasi dengan Pemerintah ditinjau dari Pandangan Internasional*, Penerbit Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Jakarta
- _____, 2003, *Instrumen-Instrumen Pengembangan Koperasi*, LSP2I, ISBN:979-95918-5-6, Jakarta
- Subyantoro, Arief, 2008, *Strategi Pengembangan Koperasi dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Bangsa*, UPN Veteran, Yogyakarta
- Suyanto, Igit, 2012, *Studi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang*. Diakses di core.ac.uk/download/pdf/11708253.pdf pada 27 Desember 2014
- Syahyuti, 2005. “*Peran Kelembagaan dalam Upaya Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Poso Pasca Konflik*” diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna, LIPI. Subang
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Sosial*, 2004, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Sumber Daya Alam antara Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.